



**Judul** : 337 juta data dukcapil diduga dibobol. kebocoran data sudah darurat  
**Tanggal** : Minggu, 23 Juli 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

## 337 Juta Data Dukcapil Diduga Dibobol

# Kebocoran Data Sudah Darurat

**Senayan menyesalkan data penduduk Indonesia diduga kembali bocor di dunia maya. Terus berulangnya kasus ini menunjukkan, pengelolaan data di republik ini dalam kondisi darurat.**

ANGGOTA Komisi I DPR Sukamta menilai, kasus bocornya data pribadi ini sangat merugikan dan membahayakan rakyat Indonesia. "Terus berulangnya kebocoran data-data di Indonesia ini menunjukkan bahwa kebocoran data sudah sangat serius," tegas Sukamta, kemarin.

Sebagaimana diketahui, sekitar 337 juta data diduga berasal dari Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diperjualbelikan di dunia maya melalui situs *darkweb*. Data yang diumbar di situs tersebut mulai dari nama lengkap disertai Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nomor akta lahir, golongan darah, agama. Lalu, data status pernikahan,

nomor akta nikah dan nomor akta cerai, peningkatan tanggal nikah/tanggal cerai, kelainan fisik, penyandang cacat, pendidikan akhir, jenis pekerjaan, hingga nama lengkap ibu dan ayah.

Sukamta khawatir, kebocoran data ini menunjukkan sangat rawannya keamanan data di dalam negeri. Bahkan dia menduga, para peretas telah menemukan kelemahan yang sama di berbagai server lembaga-lembaga pengelola data milik Pemerintah. "Tentu harus ada upaya luar biasa untuk mencegah kebocoran kembali," wantinya.

Politisi Fraksi PKS ini menilai, kasus bocornya data untuk diperjualbelikan di dunia maya bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya juga sudah terjadi

kebocoran data terhadap 34 juta data paspor WNI, 3,2 miliar data dari Aplikasi *Peduli Lindungi*, 45 juta data *MyPertamina*, 105 juta data Komisi Pemilihan Umum, dan lainnya. Sayangnya, tidak ada upaya penyelesaian dan mencegah kasus ini terulang.

Dia pun mewanti Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya antisipasi dampak dari kebocoran data ini. "Kami memperkirakan, setelah data bocor, berbagai penipuan memanfaatkan data digital ini akan meningkat," warning Sukamta.

Pemerintah, lanjutnya, mesti bisa memberikan jaminan atas data-data milik negara. Jangan sampai, kasus ini berimbas kepada kepercayaan publik kepada Pemerintah. Sehingga, masyarakat enggan melaporkan atau berpartisipasi dalam setiap upaya pengumpulan data oleh Pemerintah. "Itu akan terjadi jika tidak ada jaminan keamanan dan perbaikan sistem keamanan data-data di lembaga Pemerintah," tambah dia.

Sementara anggota Komisi I DPR Muh. Farhan meminta agar aparat penegak hukum bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bisa mengungkap para pelaku kebocoran data penduduk ini. "Apakah kita bisa menangkap dengan mengidentifikasi si pembobol datanya? Kita kembalikan kepada polisi dan BSSN," ujarnya.

Farhan menegaskan, penegakan hukum terhadap kasus kebocoran data seperti itu bisa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi dalam UU PDP ini mesti dijalankan untuk mengusut kasus ini dan kebocoran data tidak lagi terulang.

"Implementasikan Undang-Undang PDP ini, sehingga aparat bisa menerapkan sanksi atau validasi data yang kebobolan. Ini penting," tegas politisi Fraksi Nasdem.

Terpisah, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengaku

heran dengan klaim kebocoran data hingga 330 juta NIK di dunia maya. Padahal, penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 270 juta jiwa.

"Itu saja tidak masuk akal. Mosok jumlah penduduk dan NIK lebih banyak NIK yang bocor. Emang ada hantunya?" heran Budi.

Namun Budi memastikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai instansi seperti Dispenduk dan perbankan. Sebab, ada banyak instansi yang bersinggungan langsung dengan data penduduk. Untuk itu, penelusuran perlu dilakukan.

Pihaknya juga mendorong agar lembaga maupun instansi yang bersinggungan dengan data, dapat membangun sistem keamanan data agar kebocoran data pribadi ini tidak terjadi. "Karena itulah kami dari Kominfo meminta kepada seluruh instansi atau lembaga yang mengumpulkan data pribadi untuk menjaganya," tambah dia. ■ KAL